

RENCANA AKSI ATAS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI LAPORAN AKIP TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

- 1 Link Data Dukung Tindak Lanjut SAKIP (link google drive / cloud yang berisi data dukung tambahan SAKIP (yang tidak terakomodir di esr) : Link google drive tertera dalam lampiran excel dibawah
- 2 Nama Penanggung Jawab Data SAKIP/Unit Kerja : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
- 3 Nomor HP Penanggungjawab Data SAKIP : 082148743000

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
A	Perencanaan Kinerja		
1	Pemerintah Kabupaten Balangan telah berupaya melakukan perbaikan dan penyusunan penjenjangan kinerja level Kabupaten dan PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	a. Rencana Aksi pada level PD belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran strategis/kinerja yang ingin dicapai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang dimiliki. Hal ini terlihat dengan adanya kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan belum relevan dan cukup untuk menunjang kinerja strategis/sasaran perangkat daerah;	1 Mendorong adanya peningkatan kualitas rencana aksi pada level PD dengan memastikan bahwa kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan benar-benar memiliki keterkaitan secara langsung dan cukup untuk mempengaruhi pencapaian sasaran strategis/kinerja PD;	1 Melakukan asistensi penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja SKPD untuk dokumen perencanaan 2025-2029 difasilitasi Tim Kemenpan RB di Banjarmasin RB tanggal Desember 2024 2 Melakukan asistensi final penyusunan pohon kinerja PEMDA untuk dokumen perencanaan 2025-2029 difasilitasi Kemenpan RB di Jakarta tanggal 23 sampai 26 Pebruari 2025 3 Melakukan asistensi pemantapan pokin SKPD mengacu pokin Pemda hasil 23 sampai 26 Pebruari (Asistensi di Balangan offline dan online)
	b. Pohon kinerja telah disusun berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi pada level Pemerintah Daerah dan juga telah diturunkan sampai level terkecil, namun dalam penjenjangan kinerja antar level masih ditemukan beberapa kondisi kinerja yang sama antar level kinerja, khususnya pada level kinerja taktikal ke bawah sehingga hubungan sebab akibat untuk mempengaruhi pencapaian kinerja belum optimal terjadi;	2 Mereviu kembali pohon kinerja yang telah dimiliki dengan cara memastikan penjenjangan antar level kinerja, khususnya pada level kinerja taktikal ke bawah dibangun secara logis, yaitu memiliki hubungan kausalitas antar level kinerja sehingga pencapaian kondisi kinerja dapat optimal tercapai;	1 Melakukan asistensi penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja SKPD untuk dokumen perencanaan 2025-2029 difasilitasi Tim Kemenpan RB di Banjarmasin RB tanggal Desember 2024 2 Melakukan asistensi final penyusunan pohon kinerja PEMDA untuk dokumen perencanaan 2025-2029 difasilitasi Kemenpan RB di Jakarta tanggal 23 sampai 26 Pebruari 2025 3 Melakukan asistensi pemantapan pokin SKPD mengacu pokin Pemda hasil 23 sampai 26 Pebruari (Asistensi di Balangan offline dan online) 4 Menuangkan pokin Pemda hasil pembahasan Jakarta 23 sampai 26 Pebruari 2025 ke Matrik Ranwal RPJMD 2025-2029 5 Membuat Matrik Rencana IKU Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 6 Melakukan inventarisir indikator (ultimate intermediate) kinerja tujuan sasaran dan indikator kinerja taktikal pada pohon kinerja Pemda 2025-2029 7 Melakukan koordinasi dengan BPS terkait indikator kinerja yang formulasi perhitungannya melibatkan BPS 8 Merumuskan database awal atau baseline data tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 pada Pokin Pemda

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
1	c. Identifikasi crosscutting kinerja lintas PD sebagai bagian dari proses kolaborasi kinerja lintas sektor dalam mewujudkan kinerja strategis belum tergambar dengan baik sehingga pola kolaborasi kinerja lintas PD maupun terhadap stakeholder lainnya belum dapat dipastikan keandalannya dalam mendukung kinerja yang bersifat makro maupun isu strategis dari PD;	3 Menyempurnakan crosscutting kinerja yang menggambarkan sharing outcome antar lintas tugas dan fungsi PD disusun dengan memperhatikan identifikasi dari keterlibatan setiap PD yang ada untuk mengawal kinerja lintas sektoral yang bersifat makro dan yang menjadi isu strategis. kemudian ditindaklanjuti ke dalam perencanaan kinerja masing-masing PD sesuai dengan kontribusi yang dibutuhkan pada	1 Membuat crosscutting kinerja isu strategis Kemiskinan, SDM, Tata Kelola dan Pertumbuhan Ekonomi (ISU STRATEGIS 2025-2029) 2 Membuat Matrik Resiko Strategis Sasaran RPJMD 2025-2029
B	Pengukuran Kinerja		
2	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan pengembangan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta sudah membuat SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	a. Dokumen IKU formal sebagian PD belum sepenuhnya memiliki definisi operasional yang andal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa formulasi perhitungan indikator kinerja tidak relevan dengan ukuran kinerja yang akan diwujudkan, contohnya :	4 Melakukan reviu pada sebagian IKU PD agar memiliki definisi operasional yang andal dengan memastikan formulasi perhitungan indikator kinerja relevan dengan ukuran kinerja yang akan diwujudkan;	1 Melakukan asistensi pemantapan Pokin SKPD mengacu Pokin Pemda hasil 23 sampai 26 Pebruari 2025 (Asistensi di Balangan offline dan online) 2 Membuat matrik rencana IKU Tujuan dan Sasaran RENSTRA 2025-2029 3 Melakukan inventarisir indikator kinerja Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Taktikal pada Pohon Kinerja SKPD 2025-2029 4 Membuat Matrik Resiko Strategis Sasaran Renstra SKPD 2025-2029
	- Pada indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu "persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar" namun formulasinya adalah "jumlah Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dibagi jumlah tenaga kesehatan dikalikan seratus persen";		
	- Pada indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu "Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan", namun formulasi mengukur "persentase OPD yang memanfaatkan data sektoral;		
	- Pada indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu "Tingkat partisipasi masyarakat, namun formulasinya adalah "jumlah masyarakat yang sudah diberikan wawasan politik dibagi jumlah pemilih (DPT) dikalikan seratus persen.		
	b. Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan belum sepenuhnya efektif untuk dimanfaatkan sebagai sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Hal ini disebabkan masih ditemukannya penetapan target kinerja berjenjang (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya ada beberapa target yang tidak ditetapkan,	5 Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Balangan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja berjenjang (program, kegiatan dan sub kegiatan) agar sesuai dengan kebutuhan, yaitu menetapkan target berkala sesuai dengan kondisi real di lapangan dan juga menyampaikan	1 Melakukan pengisian data PK Murni Tahun 2025 ke Aplikasi Sakip Replikasi Sakip HSS 2 Melakukan pengisian data rencana aksi berdasarkan PK Murni Tahun 2025 ke Aplikasi Sakip Replikasi Sakip HSS 3 Melakukan entri realisasi rencana aksi berdasarkan PK Murni Tahun 2025 kedalam Aplikasi Sakip Replikasi HSS 4 Melakukan entri data resiko strategis dan operasional pada Aplikasi Sakip Replikasi HSS mengacu pada Pokin Lama 5 Melakukan pengembangan Aplikasi SIMBA SAKIP terintegrasi, dimana menunya akan memuat seluruh dokumen terbaru (pokin 2025-2029, dokren 2025-2029, PK 2025-2029, rencana aksi 2025 mengacu Pokin Baru)

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
2	c. Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan.	6 Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan strategi,kebijakan, aktivitas dan anggaran guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan;	1 Menyusun PK Murni SKPD Tahun 2025 berdasarkan Pokin Lama
			2 Menyusun Rencana Aksi Tahun 2025 basis Pokin Lama
			3 Menyusun Renstra 2025-2029 Basis Pokin Baru
			4 Menyusun PK Perubahan Basis Pokin Baru (Dokren 2025-2029)
C	Pelaporan Kinerja		
3	Pemerintah Kabupaten Balangan telah berupaya meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LPPD dan LAKIP seluruh PD melalui sosialisasi pengerjaan laporan kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, diantaranya sebagai berikut:		
	a. Laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan PD sudah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, namun analisis yang disajikan belum mengarah ke dampak pencapaian kinerja program/kegiatan sehingga tidak didapatkan informasi yang jelas terkait sejauh mana program/kegiatan tersebut menunjang kinerja strategis atau tidak;	7 Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan PD dengan cara memastikan penyajian analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja untuk dapat menggambarkan dampak sejauh mana pencapaian kinerja program/kegiatan tersebut menunjang kinerja strategis yang ingin diwujudkan;	1 Melakukan peningkatan kemampuan menyusun LKIP yang regulatif dengan sosialisasi secara daring oleh Kemenpan RB
			2 Melakukan Asistensi Penyusunan LKIP SKPD dan LKIP Pemda di Banjarmasin.
			3 Membuat Notulen tentang Keselarasan Catatan Rekomendasi Menpan pada saat Asistensi LKIP SKPD di Banjarmasin dengan Dokumen LKIP SKPD yang diupload di ESR Kemenpan RB
			4 Melakukan rapat pra penyusunan LKIP Pemda dengan beberapa pemangku sasaran prioritas RPJMD 2021-2026 di bulan Januari tahun 2025
			5 Melakukan rapat validasi Data LKIP Pemda dengan beberapa pemangku sasaran strategis RPJMD 2021-2026 sebelum dokumen LKIP Pemda diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan review
			6 Membuat berita acara penajaman sasaran strategis (target dokren) tahun 2024 pada bulan September 2024 sesuai perubahan PK. Dimana didalam berita acara memuat bahwa LKIP Tahun 2024 disusun berdasarkan pohon kinerja hasil reviu bulan Mei tahun 2023. Karena perubahan RPJMD baru akan dilakukan pada tahun 2025 sehingga hasil reviu pokin oleh Kemenpan RB dan evaluasi mandiri dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Murni 2024 dan
			7 Membuat PK Murni Pemda Tahun 2025 masih berdasarkan Pokin hasil reviu Kemenpan RB pada bulan Mei Tahun 2023
			8 Membuat PK Perubahan Pemda Tahun 2025 berdasarkan Pokin Terbaru dan Dokren Terbaru 2025-2029
	b. Belum maksimalnya pemanfaatan laporan kinerja, khususnya pada level PD untuk dijadikan dasar penetapan strategi atau aktivitas dan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun depan.	8 Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja, khususnya pada level PD untuk dijadikan dasar penetapan strategi atau aktivitas dan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun depan;	1 Melakukan asistensi pohon kinerja SKPD mengacu pada Pokin Pemda untuk dokren 2025-2029 dan menjadikan target di LKIP tahun sebelumnya sebagai catatan perbaikan kinerja

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
4	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluruh PD. Sudah dilakukan upaya peningkatan kualitas evaluator internal dengan melakukan bimbingan teknis bagi seluruh evaluator internal. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diantaranya sebagai berikut:		
	a. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disusun belum sepenuhnya berkualitas. Hal ini disebabkan masih ditemukannya laporan hasil evaluasi yang standar isinya berbeda-beda antar PD sehingga perbaikan SAKIP di lingkungan antar PD tidak sama dan merata;	9 Mendorong adanya peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan muatan isi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terstandar, sehingga perbaikan implimentasi SAKIP akibat tindaklanjut laporan tersebut dapat merata pada setiap PD yang dievaluasi;	1 Membuat LKIP Pemda sesuai Pedoman Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 2 Membuat LKIP SKPD sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 3 Membuat rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi APIP
	b. Belum optimalnya upaya pemantauan dan reviu oleh Inspektorat atas tindaklanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD yang dievaluasi. Hal ini terlihat dari masih belum seluruh PD melakukan tindaklanjut yang optimal terhadap rekomendasi yang ada dalam LHE AKIP Internal.	10 Mendorong pelaksanaan pemantauan secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada PD melalui LHE AKIP internal guna memastikan bahwa tindaklanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan oleh evaluator internal dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	1 Melakukan monev triwulan hasil LHE SAKIP SKPD 2 Melakukan pelatihan tahap awal bagi APIP untuk peningkatan kompetensi dalam hal evaluasi SAKIP SKPD (FGD) 3 Melakukan pelatihan tahap pemantapan bagi APIP untuk peningkatan kompetensi dalam hal evaluasi SAKIP SKPD (TFT)


 BUPATI BALANGAN
 SEKRETARIS DAERAH,

 H. SUTIKNO, AP, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19760417 199412 1 001